

PENDAPATAN DAERAH DI INDONESIA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI

Syamsul*¹

(syamsulsyahrir@gmail.com)

Dini Rosyada²

(Dinirosyada1@gmail.com)

Dwi Wahyono³

(ngalam.medok@gmail.com)

^{1,2} Program Studi Akuntansi, STIE PB Palu, Indonesia

³ Program Studi Manajemen, STIE PB Palu, Indonesia

Abstrak

Beberapa Negara di Dunia, mengambil kebijakan penanganan penyebaran COVID-19, dengan memberlakukan pembatasan sosial, termasuk Indonesia. Penerapan kebijakan ini ternyata berdampak pada keterpurukan ekonomi, dan penurunan pendapatan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yang diperoleh dari data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Populasi dan sampel untuk penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Analisis data menggunakan uji beda, *paired samples t test*. Hasil pengujian menunjukkan ada perbedaan pendapatan daerah antara sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19. Dengan kata lain, penelitian ini menginformasikan bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi pada pendapatan daerah di Indonesia. Temuan ini memperkaya literatur tentang topik pandemi COVID-19 dan pendapatan daerah.

Kata Kunci: COVID-19; Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pajak Daerah; Retribusi Daerah

Abstract

Several countries in the world have taken policies to handle the spread of COVID-19, by imposing social restrictions, including Indonesia. The implementation of this policy turned out to have an impact on the economic downturn, and a decline in government revenues. The purpose of this study is to provide empirical evidence of the impact of the COVID-19 pandemic on regional income in Indonesia. This research is a quantitative research. The type of data used is quantitative data, which is sourced from secondary data using documentation data collection techniques. The sample of this research is 85 district/city governments in Indonesia. Data were analyzed using a different test, paired samples t test. The results of the test prove that there is a difference in regional income before the COVID-19 pandemic and during the Covid-19 pandemic. In other words, this study informs that the COVID-19 pandemic has an impact on regional income in Indonesia. This finding enriches the literature on the COVID-19 pandemic and regional income.

Keyword: COVID-19; Local Own Revenue (PAD); Local Taxes; Local Retribution

PENDAHULUAN

Tepatnya, pada Hari Rabu, 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memutuskan bahwa Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) yang berasal dari Kota Wuhan, Cina, sebagai pandemi (Setiawan, 2020). Beberapa Negara di Dunia, mengambil kebijakan penanganan penyebaran COVID-19, dengan memberlakukan pembatasan sosial, termasuk di Indonesia. Namun, kebijakan ini ternyata berdampak pada lumpuhnya aktivitas dari berbagai sektor, diantaranya, sektor pariwisata, perdagangan, manufaktur, pendidikan, pertambangan, dan sektor jasa lainnya (Green & Loualiche, 2021; Guo & Shi, 2020). Terbatasnya aktivitas dari sektor tersebut, ternyata berimbas pada keterpurukan ekonomi (Auerbach, Gale, Lutz & Sheiner, 2020).

Pandemi COVID-19, selain mengakibatkan perekonomian dan bisnis tergoncang, juga berimplikasi pada penurunan penerimaan pemerintah pusat dan daerah. Penelitian Guo & Shi (2021) yang dilakukan di Tiongkok, mengindikasikan bahwa keberadaan pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap turunnya pendapatan pemerintah pusat dan daerah. Hasil penelitian Alison (2020) di Amerika Serikat, juga menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 telah mengganggu pengumpulan pajak dan mendorong peningkatan pengeluaran medis, dengan konsekuensi keuangan yang berpotensi serius bagi pemerintah negara bagian dan daerah. Green & Loualiche (2021) dalam penelitiannya, mengatakan bahwa hadirnya pandemi COVID-19, membawa kerugian besar terhadap pendapatan daerah.

Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, pendapatan daerah salah satunya diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD). PAD adalah cerminan perekonomian daerah, karena PAD diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya dan potensi di daerah itu sendiri. Mengingat di saat pandemi COVID-19 melanda dan penerapan pembatasan sosial, menyebabkan aktivitas masyarakat dan entitas bisnis di wilayah tersebut berkurang. Akibatnya, daya beli masyarakat dan omzet penjualan entitas bisnis juga berkurang, sehingga perekonomian terpuruk dan penerimaan pendapatan pemerintah daerah pun menjadi sedikit. Beberapa penelitian mengungkap fenomena pandemi COVID-19 dan kaitannya dengan kapasitas anggaran (pendapatan) pemerintah di Indonesia. Akan tetapi, lingkungannya masih pada tataran pemerintah pusat (makro) (Hadiwardoyo, 2020; Handoyo, 2020; Sayadi, 2021) dan terbatas pada satu pemerintah daerah saja (Meiryani, Fernando, Dewiyanti, Angelus, & Haliyanti, 2021; Putra, 2020; Soehardi & Untari, 2020), sehingga belum dapat memberikan informasi yang memadai. Dengan kata lain, penelitian tersebut belum cukup menggambarkan kondisi pendapatan pemerintah daerah ditengah pandemi COVID-19, sehingga patut disayangkan. Dengan demikian, hadirnya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan secara empiris tentang dampak pandemi COVID-19 pada pendapatan daerah di Indonesia. Pada sisi lain, riset ini diupayakan memberikan informasi tambahan bagi pemangku kepentingan dalam menghadapi situasi yang sama dengan pandemi COVID-19 di masa mendatang.

TELAAH LITERATUR

Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)

Di laman Haldoc.com disebutkan bahwa corona virus Diseases 2019 (COVID-19) termasuk dalam kelompok besar virus yang mengakibatkan kontaminasi pada saluran pernapasan atas ringan hingga sedang (Fadli, 2020). Virus ini hanya dapat bertahan hidup selama 3 jam di udara, sehingga peluang terjadinya penularan melalui udara sangat kecil. Dengan demikian, COVID-19 dapat ditularkan dari seseorang yang terinfeksi ke orang lain yang berada disampingnya melalui bersin atau batuk.

Kenyataannya, krisis COVID-19 tidak semata berdampak pada aspek kesehatan, mobilitas tetapi secara signifikan berdampak pula pada kemerosotan perekonomian yang hampir merata di seluruh dunia (Alison, 2020; Kovács Koós, Uzzoli, Páger & Egyed, 2020). Didier, Huneus, Larrain, & Schmukler (2020) mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 mengganggu roda perekonomian dunia. Kovács, et. al. (2020) menginformasikan bahwa pandemi COVID-19 mengancam perekonomian di Hungaria. Guo & Shi (2021) mengatakan bahwa pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 membawa kesulitan, risiko, dan rintangan yang tidak pernah dilalui sebelumnya bagi perkembangan ekonomi Tiongkok. Pandemi Covid-19 mengakibatkan kerugian bagi Negara karena pendapatan anjlok, khususnya dari pajak (Hadiwardoyo, 2020). Dalam lingkup bisnis, Penelitian Rababah, Al-Haddad, Sial, Chunmei, & Cherian (2020) menginformasikan bahwa datangnya pandemi COVID-19 membawa dampak negatif pada kinerja berbagai sektor industri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan pandemi COVID-19 tidak hanya membawa resiko bagi individu, tetapi juga pada sektor publik (pemerintah) dan privat (bisnis).

Pengembangan Hipotesis

Penelitian Heald and Hodges (2020) yang menganalisis dampak darurat COVID-19 pada keuangan pemerintah Inggris. Ada efek signifikan pada keuangan pemerintah Inggris. Penerimaan pemerintah turun 12% dan pengeluaran meningkat 36% dalam tiga bulan pertama krisis (April–Juni 2020), dibandingkan tahun sebelumnya, dan tingkat utang pemerintah meningkat tajam. Pandemi akan memiliki dampak terbesar pada keuangan publik Inggris dan menciptakan defisit anggaran yang cukup berarti. Penelitian Elkhachen, Sarhan, & Ejiogu (2021) membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Mesir dan respons anggaran pemerintah Mesir terhadap pandemi tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa respons pemerintah Mesir terhadap pandemi akan menyusutkan ruang fiskal Mesir secara signifikan karena peningkatan pinjaman dan kewajiban pembayaran utang tidak diimbangi dengan penerapan pajak atas gaji dan upah. Studi Makin & Layton (2021) menjelaskan dampak makroekonomi global COVID-19 dan pengaruhnya terhadap defisit anggaran dan tingkat utang pemerintah. Pemerintah di seluruh dunia menanggapi krisis COVID19 dengan secara agresif menerapkan kebijakan fiskal untuk meningkatkan pengeluaran kesehatan, transfer pendapatan dan peningkatan pembayaran kesejahteraan, serta subsidi upah kepada perusahaan untuk mempertahankan karyawan guna meminimalkan pengangguran jangka pendek. Temuan Cho, Jérôme, &

Maurice (2021) menunjukkan pemerintah Prancis menghadapi krisis kesehatan dengan tingkat utang yang sangat tinggi, yang telah memperumit pengelolaan krisis COVID-19. Begitupula, hasil penelitian de Jong & Ho (2021) menemukan bahwa pandemic COVID-19 mempengaruhi kondisi anggaran di 17 negara maju, sehingga akan meningkatkan utang Negara. Dengan kata lain, penelitian ini mengindikasikan rendahnya penerimaan pendapatan pemerintah selama pandemi COVID-19.

Merebaknya pandemi COVID-19 mengakibatkan berkurangnya pendapatan pemerintah (Kass, Kriz & Merriman, 2020). Chernick, Copeland & Reschovsky (2020) mengevaluasi potensi dampak fiskal yang terjadi pada 150 Kota di Amerika dari resesi yang disebabkan oleh COVID-19. Mereka memperkirakan pendapatan utama kota tersebut, dari sumber properti, pajak, retribusi, dan bantuan antar pemerintah mengalami penurunan pendapatan sebesar 5,5 persen sampai 9 persen akibat pandemi COVID-19. Begitupula, temuan Ward et al. (2020) yang menginformasikan bahwa pandemi COVID-19, khususnya implementasi kebijakan pembatasan sosial (*lockdown*), mempunyai efek yang sangat negatif terhadap perekonomian di Amerika Serikat, salah satu konsekuensi dari kontraksi ekonomi ini adalah turunnya pendapatan pajak pemerintah negara bagian dan lokal. Hasil penelitian Bonaccorsi et al. (2020) di Italia, menemukan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat dan daerah. Kejadian serupa, juga ditunjukkan oleh Černinko, Neubauerová & Zubal'ová (2021) bahwa dampak COVID-19 berimplikasi pada rendahnya realisasi pendapatan pemerintah daerah di Slowakia. Intinya, pandemi COVID-19 mempengaruhi perekonomian dan berimbas pula pada pendapatan pemerintah.

Kemudian, Guo & Chen (2021) mengemukakan bahwa dampak pandemi pada pendapatan pemerintah kota di Florida, yaitu terjadinya penurunan pendapatan yang signifikan yang diprediksi berlangsung sampai tahun anggaran 2023. Temuan Nemeč & Špaček (2020) di Ceko dan Slowakia menunjukkan bahwa hadirnya pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada kemampuan keuangan pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran pendapatan maupun pengeluaran. Lebih jauh, Guo & Shi (2020) juga menerangkan bahwa dari sisi permintaan, pandemi COVID-19 mengurangi mobilitas orang dan material, konsumsi makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi masyarakat terpengaruh secara signifikan. Secara khusus, konsumsi di industri jasa terkonsentrasi seperti pariwisata, katering dan akomodasi, budaya dan hiburan dan transportasi sangat terpengaruh (Guo & Shi, 2020). Beberapa temuan penelitian tersebut, pada intinya menginformasikan bahwa keberadaan pandemi COVID-19 membawa pengaruh negatif terhadap penerimaan pendapatan pusat dan daerah.

Dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia, pada saat penerapan kebijakan pembatasan sosial terkait penanganan penyebaran COVID-19, menyebabkan aktivitas masyarakat dan dunia usaha di daerah berkurang, dan pelayanan publik di daerah juga dibatasi. Karena terbatasnya kegiatan tersebut, hal ini pada akhirnya berdampak pada pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu jenis pendapatan daerah, yang diterima pemerintah daerah berdasarkan hasil pengelolaan potensi daerah itu sendiri. Sumber utama PAD, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah sangat tergantung

dari lancarnya aktivitas masyarakat dan bisnis di suatu wilayah. Misalnya, dari sumber pajak daerah, sebelum pandemi COVID-19 aktivitas masyarakat dan bisnis tidak dibatasi, sehingga berimplikasi pada tingginya daya beli masyarakat dan bertambahnya laba yang diperoleh entitas bisnis. Kondisi ini mengakibatkan tingginya penerimaan daerah dari sektor perpajakan. Sebaliknya, di saat hadirnya pandemi COVID-19, aktivitas masyarakat dan bisnis berkurang, berakibat pula pada lemahnya daya beli masyarakat dan laba yang diperoleh entitas bisnis juga berkurang, yang pada akhirnya terjadi pula penurunan pada pendapatan daerah dari sumber pajak daerah. Misalnya, usaha kuliner selama pandemi COVID-19 berlansung, tidak seramai sebelum merebaknya pandemi COVID-19. Berkurangnya pengunjung ke tempat usaha kuliner tersebut, berimbas pula pada sumber pendapatan dari sektor perparkiran. Selama pandemi COVID-19 pendapatan daerah dari sumber pajak mineral bukan logam dan batuan, dikarenakan terjadinya refocusing pemotongan anggaran program pembangunan yang dialihkan ke program penanganan COVID-19. Begitupula, dari sumber pajak daerah yang berasal dari industri perhotelan, selama pandemi COVID-19 tingkat okupasi turun, karena terbatas kunjungan masyarakat dari luar daerah yang menjadi pelanggan utama usaha perhotelan, sehingga berdampak pula pada turunnya pendapatan dari sumber pajak hotel. Kondisi yang sama juga terjadi dari sumber pajak usaha restoran mengalami penurunan selama pandemi COVID-19 karena berkurangnya permintaan dari masyarakat.

Kemudian, pendapatan daerah yang diperoleh dari retribusi daerah sangat tergantung pada lalu lintas pergerakan masyarakat dan bisnis. Sebelum pandemi COVID-19 pelayanan publik pemerintah daerah tidak dibatasi, maka pendapatan daerah yang diterima dari sumber retribusi daerah pun tinggi. Lain halnya, di saat pandemi COVID-19, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah sangat terbatas, sehingga pendapatan daerah dari sumber retribusi daerah juga sedikit (rendah). Misalnya, sumber pendapatan dari usaha pariwisata, dimasa pandemi COVID-19 sepi pengunjung, karena dibatasi dan bahkan di beberapa lokasi ditutup sementara, sehingga pendapatan daerah dari sumber tersebut turun. Begitupula, dari sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, penerimaan pendapatan daerah dari kedua sumber tersebut juga sangat tergantung dari aktivitas masyarakat dan bisnis di wilayah itu. Intinya, PAD turun karena perekonomian daerah lesu imbas dari berkurangnya aktivitas masyarakat. Dengan demikian, hipotesis alternatif disusun sebagai berikut:

H_a: Terdapat perbedaan pendapatan daerah sebelum dan selama pandemi

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 508 kabupaten/kota otonom, tidak termasuk kabupaten/kota administrasi di DKI Jakarta. Kemudian penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan presisi error 10 persen. Sampel penelitian ini dengan demikian terdiri dari 85 kabupaten/kota. Sampel dipilih berdasarkan *purposive sampling* dengan mempertimbangkan nilai PAD tertinggi, rata-rata dan terendah dari kabupaten/kota di setiap provinsi (lihat, lampiran 1 dan 2).

Pada penelitian ini, variabel pendapatan daerah diproksikan pada besarnya PAD yang diterima oleh pemerintah daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19. PAD sebelum pandemi COVID-19 diukur berdasarkan realisasi PAD tahun 2019. Sedangkan PAD selama pandemi COVID-19 diukur berdasarkan realisasi PAD tahun 2020. PAD mencerminkan tingkat keberhasilan pengelolaan potensi daerah oleh pemerintah daerah. Selain itu, PAD juga melambangkan tingkat kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat (Syamsul, 2019; Syamsul, 2020). Selain itu, data dianalisis menggunakan teknik analisis uji lain, uji t sampel berpasangan menggunakan SPSS.

HASIL PENELITIAN

Statistik deskriptif pada tabel 1 menggambarkan pendapatan asli daerah (PAD) sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19. Dapat dilihat dari tabel bahwa rata-rata PAD sebelum pandemi COVID-19 adalah Rp492.395.476.906,45 sedangkan rata-rata PAD selama pandemi COVID-19 adalah Rp319.675.702.769,95. Itu artinya PAD mengalami penurunan sebesar 35,08 persen sejak pandemi COVID-19.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

		<i>Mean</i>	<i>N</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error Mean</i>
Pa r 1	Sebelum	492395476906,44	85	798989034145,233	86662528484,605
	- Pandemi	70		00	70
	Selama_ Pandemi	319675702769,95	85	543785028251,827	58981767566,799
		30		00	80

Sumber: Data diolah, 2021

Selanjutnya, analisis uji korelasi pada tabel 2 menginformasikan bahwa hubungan antara PAD sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19 adalah 0,969 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya korelasi yang sangat signifikan antara PAD tahun 2019 dengan PAD tahun 2020.

Tabel 2. Uji Korelasi

		<i>N</i>	<i>Correlation</i>	<i>Sig.</i>
Pa r 1	Sebelum_Pandemi dan Selama_Pandemi	85	0,969	0,000

Sumber: Data diolah, 2021

Kemudian, hasil analisis uji beda pada tabel 3 menginformasikan bahwa t-hitung adalah 5,257 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, hipotesis yang disusun pada penelitian ini dianggap terdukung. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan PAD sebelum dan saat pandemi COVID-19.

Tabel 3. Hasil Uji Beda

		<i>t</i>	<i>df</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>
Pair 1	Sebelum_Pandemi- Selama_Pandemi	5,257	84	0,000

Sumber: Data diolah, 2021

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil statistik deksriptif yang dilakukan mengindikasikan bahwa terjadi penurunan penerimaan pendapatan daerah selama pandemi COVID-19. Demikian pula, analisis uji beda juga membenarkan adanya perbedaan pendapatan daerah yang diterima pemerintah daerah di Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID-19. Artinya, penelitian ini membuktikan bahwa kehadiran pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan pendapatan daerah di Indonesia. Pada dasarnya PAD turun, sebagai dampak dari turunnya aktivitas masyarakat dan lambatnya pertumbuhan perekonomian daerah. Hadirnya pandemi COVID-19 menyebabkan aktivitas masyarakat berkurang, sehingga berdampak pada lesunya sumber-sumber perekonomian daerah. Lesunya kegiatan ekonomi setelah diterapkannya pembatasan sosial, berimbas pula pada penerimaan pendapatan daerah dari sumber PAD.

Hasil penelitian ini menguatkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan bahwa PAD anjlok di tengah pandemi (CNN Indonesia, 2020). Temuan ini juga membenarkan ungkapan Sri Mulyani yang menjelaskan bahwa realisasi PAD pada tahun 2020 sebesar Rp250,3 triliun, turun 5,3 persen dari tahun 2019 sebesar Rp293,6 triliun (Sulaeman, 2021). Penelitian ini menguatkan argumentasi Astera Primanto Bhakti yang menyatakan bahwa total ada 530 daerah di Indonesia terjadi penurunan pendapatan hingga 15,81 persen (Tirto.id, 2020).

Selain itu, penelitian ini selaras dengan temuan, Guo dan She (2021) di Tiongkok yang menginformasikan bahwa dampak pandemi COVID-19, membuat pertumbuhan pendapatan fiskal turun dari masing-masing 5.71% dan 5.6% menjadi 12.54% dan 13,31%, serta kekuatan fiskal pemerintah sangat melemah. Bahkan, penelitian ini paralel dengan temuan Bonaccorsi et al. (2020) di Italia, Haji (2021) di Tanzania, Ward et al. (2020) di Amerika Serikat, Nemeč & Špaček (2020) di Ceko dan Slowakia, Černíňko et al. (2021) di Slowakia yang mengindikasikan bahwa pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap berkurangnya pendapatan yang diterima pemerintah. Di Indonesia, Sayadi (2021) juga menunjukkan bahwa pendapatan negara turun signifikan selama pandemi COVID-19 dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Hasil penelitian Syamsul, Nurlailah, & Nurhadi (2022) yang menjelaskan bahwa hadirnya pandemi COVID-19 berimplikasi terhadap penurunan pendapatan daerah yang berasal dari dua sumber utama PAD yaitu pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia.

Pajak daerah adalah salah satu sumber utama dari PAD kabupaten/kota di Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, terdapat beberapa jenis pajak daerah yang paling tertekan, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak air tanah.

Turunnya pendapatan daerah dari sumber pajak daerah, disebabkan beberapa objek pajak mengalami penurunan omzet usaha pada waktu pandemi COVID-19. Dikarenakan mobilitas masyarakat dan bisnis menjadi berkurang, bahkan berhenti setelah diterapkannya kebijakan pembatasan sosial, untuk membatasi penyebaran virus COVID-19. Dengan demikian, usaha hotel dan restoran tutup, bisnis hiburan berhenti, jam operasional dan kapasitas pusat pembelanjaan terbatas. Padahal, dari sektor ini sumber utama pajak daerah tersebut diperoleh. Menurut Ketua Badan PHRI Sutrisno Iwantono, yang dikutip dari Andri (2021) menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berimbas pada lumpuhnya industri hotel dan restoran, ribuan hotel dan restoran tutup. Dia mencatat saat ini di Indonesia terdapat 1.033 restoran dan hotel yang tutup permanen imbas pandemi COVID-19. Merujuk pada data yang dipublikasikan di menu Portal Data APBD Kementerian Keuangan, tercatat realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp208.938,20 Miliar, sementara realisasi pada tahun 2020 sebesar 179.257,32 Miliar. Artinya, secara nasional terjadi penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 14,21 persen, setara dengan Rp29.680,88 Miliar (Kemenkeu, 18 November 2021). Intinya, selama pandemi COVID-19 terdapat penurunan PAD, yang bersumber dari pajak daerah.

Kemudian, penopang utama PAD juga bersumber dari retribusi daerah. Akan tetapi, selama pandemi COVID-19 pendapatan daerah dari sumber tersebut juga terganggu. Utamanya, pada saat penerapan pembatasan sosial, mengakibatkan pelayanan publik tidak berjalan. Terhambatnya pelayanan publik, mengindikasikan berhentinya jasa yang diberikan kepada masyarakat, membuat daerah tidak dapat memungut retribusi kepada masyarakat. Kondisi ini juga telah diungkapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Jokowi Widodo, yang mengungkapkan pembatasan aktivitas masyarakat dengan harapan dapat mengisolasi penyebaran COVID-19 menghalangi pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan retribusi. Padahal menurut Beliau, retribusi adalah salah satu andalan penerimaan daerah (CNN Indonesia, 2020). Data yang disajikan dalam laman Kementerian Keuangan pada menu Portal Data APBD menunjukkan realisasi retribusi daerah pada tahun 2019 sebesar Rp9.790,45 Miliar, dan pada tahun 2020 sebesar Rp8.414,21 Miliar. Angka ini menunjukkan adanya penurunan realisasi retribusi daerah sebesar Rp1.376,24 Miliar, atau terjadi pertumbuhan minus 14,06 persen (Kemenkeu, 18 November 2021). Singkatnya, secara nasional terdapat penurunan PAD selama pandemi COVID-19 yang dipungut dari retribusi daerah.

Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Merujuk pada Portal Data APBD Kementerian Keuangan ditunjukkan bahwa realisasi hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan tahun 2019 sebesar Rp8.876,87 Miliar dan tahun 2020 sebesar Rp8.558,54 Miliar (Kemenkeu, 18 November 2021). Artinya, terdapat penurunan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp318,33 Miliar (3,59%). Selama pandemi COVID-19, PAD dari sumber hasil pengelolaan keuangan daerah mengalami juga mengalami penurunan, meskipun tidak terlalu signifikan. Kemudian, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, berdasarkan pada Portal Data APBD Kementerian Keuangan terlihat capaian lain-lain PAD yang sah pada tahun 2019 sebesar Rp66.054,04 Miliar dan pada tahun 2020 sebesar 67.734,58 Miliar

(Kemenkeu, 18 November 2021). Artinya, terdapat kenaikan sebesar Rp1.680,54 Miliar, atau sebesar 2,54 persen. Kondisi ini menunjukkan secara nasional terlihat selama pandemi COVID-19 terjadi pertumbuhan penerimaan PAD yang diperoleh dari lain-lain PAD yang sah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menginformasikan bahwa ada perbedaan pendapatan daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19, yang diproksikan dengan PAD tahun 2019 dan PAD untuk tahun 2020. Dengan kata lain, penelitian ini mengindikasikan bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil studi ini menguatkan temuan penelitian sebelumnya yang mengkaji dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, bisnis (perusahaan), keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Penelitian berimplikasi dalam informasi tambahan bagi para pemangku kepentingan (pengambil kebijakan), pemerintah pusat dan daerah dalam pengambilan keputusan penanganan pandemi COVID-19. Maupun, situasi yang sama dengan pandemi ini dan peningkatan pendapatan daerah di masa depan. Dua hal yang penting dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan penerimaan PAD di masa pandemi, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan PAD. Intensifikasi sumber PAD, melalui perhitungan kembali potensi PAD seakurat mungkin, dan melakukan upaya seoptimal mungkin dalam merealisasikannya. Misalnya, penerapan metode pembayaran online, atau askes Qris sehingga memudahkan masyarakat dalam membayar pajak, dan pembayaran lainnya atas layanan yang diterimanya. Kemudian, dalam hal ekstensifikasi sumber PAD, melalui penciptaan atau penelusuran sumber-sumber PAD yang baru dan potensial.

Dalam kalangan akademisi, studi ini memberikan literatur tambahan sebagai sumber referensi dalam melakukan kajian mendalam terkait dengan pandemi COVID-19 dan pendapatan daerah. Penelitian ini terbatas dalam mengukur pendapatan daerah, hanya diproksikan dengan realisasi PAD. Dengan kata lain, penelitian ini tidak menguji dampak pandemi COVID-19 berdasarkan komponen pendapatan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, tidak diketahui seluruh komponen pendapatan daerah terkena dampak COVID-19. Saran untuk penelitian selanjutnya, dapat menganalisis dari setiap komponen PAD sehingga diperoleh informasi komponen PAD mana saja yang mengalami penurunan di masa pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Alison, F. (2020). COVID-19 Challenges State and Local Government Finances. *KcFED Economic Bulletin*, 10–13. Retrieved from <https://www.kansascityfed.org/publications/research/eb/articles/2020/covid-19-challenges-state-local-government-finances>
- Andri, Y. (2021). Ribuan Hotel dan Restoran Tutup Permanen Akibat Pandemi Covid-19. Diakses, 20 November 2021.
- Auerbach, A. J., Gale, W. G., Lutz, B., & Sheiner, L. (2020). Effects of COVID-19 on

- Federal, State, and Local Government Budgets. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2020(3), 229–278. <https://doi.org/10.1353/eca.2020.0028>
- Bonaccorsi, G., Pierri, F., Cinelli, M., Flori, A., Galeazzi, A., Porcelli, F., ... Pammolli, F. (2020). Economic and social consequences of human mobility restrictions under COVID-19. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(27), 15530–15535. <https://doi.org/10.1073/pnas.2007658117>
- Černíková, T., Neubauerová, E., & Zubaľová, A. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on the budget of slovak local governments: Much cry and little wool? *Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration*, 29(1), 1–14. <https://doi.org/10.46585/sp29011249>
- Chernick, H., Copeland, D., & Reschovsky, A. (2020). The fiscal effects of the covid-19 pandemic on cities: An initial assessment. *National Tax Journal*, 73(3), 699–732. <https://doi.org/10.17310/ntj.2020.3.04>
- Cho, C. H., Jérôme, T., & Maurice, J. (2021). “Whatever it takes”: first budgetary responses to the COVID-19 pandemic in France. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 29(6), 12–23. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0126>
- de Jong, M., & Ho, A. T. (2021). Emerging fiscal health and governance concerns resulting from COVID-19 challenges. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 29(6), 1–11. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0137>
- Didier, T., Huneus, F., Larrain, M., & Schmukler, S. L. (2020). Research & Policy Briefs Financing Firms in Hibernation during the COVID-19 Pandemic. *Research & Policy Briefs*, (30), 1–7.
- Elkhashen, E. M., Sarhan, A., & Ejiogu, A. (2021). Egyptian budgetary responses to COVID-19 and their social and economic consequences. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 33(1), 78–86. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0116>
- Fadli, R. (2020). Coronavirus. Retrieved June 24, 2021, from halodoc.com website: <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>
- Green, D., & Loualiche, E. (2021). State and local government employment in the COVID-19 crisis. *Journal of Public Economics*, 193. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104321>
- Guo, H., & Chen, C. (2021). Forecasting Revenue Impacts from COVID-19: The Case of Florida Municipalities. *State and Local Government Review*, 53(1), 78–88. <https://doi.org/10.1177/0160323X211012056>
- Guo, Y. M., & Shi, Y. R. (2020). Impact of the VAT reduction policy on local fiscal pressure in China in light of the COVID-19 pandemic: A measurement based on a computable general equilibrium model. *Economic Analysis and Policy*, 69, 253–264. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.12.010>
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Haji, S. H. H. (2021). The Effects of COVID-19 Pandemic on the Government Revenue in the Extractive Industry in Tanzania. *Journal of Economics, Management and Trade*, 27(3), 12–29. <https://doi.org/10.9734/jemt/2021/v27i330332>
- Handoyo, R. D. (2020). Editorial: Impact of Covid 19 on Trade, Fdi, Real Exchange Rate and Era of Digitalization: Brief Review Global Economy During Pandemic. *Journal*

- of Developing Economies*, 5(2), 86. <https://doi.org/10.20473/jde.v5i2.23641>
- Heald, D., & Hodges, R. (2020). The accounting, budgeting and fiscal impact of COVID-19 on the United Kingdom. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 785–795. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0121>
- Indonesia, C. (2020). Jokowi Sebut Pendapatan Asli Daerah Anjlok di Tengah Corona. Retrieved from CNN Indonesia website: Jokowi Sebut Pendapatan Asli Daerah Anjlok di Tengah Corona. Diakses, 20 November 2021.
- Kass, A., Kriz, K., & Merriman, D. (2020). What Policymakers Should Know About the Fiscal Impact of COVID-19 on Illinois How Will the COVID-19 Pandemic Effect the Economy? *Institute of Government and Public Affairs*, (217).
- Kemenkeu. (2021). Postur Data APBD Tahun 2020. Retrieved November 18, 2021, from Kementrian Keuangan Republik Indonesian website: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2020&provinsi=--&pemda=-->
- Kovács, S. Z., Koós, B., Uzzoli, A., Páger, B., & Egyed, I. (2020). Regional effects of the COVID-19 pandemic and policy responses in Hungary. *R-Economy*, 6(3), 208–221. <https://doi.org/10.15826/recon.2020.6.3.018>
- Makin, A. J., & Layton, A. (2021). The global fiscal response to COVID-19: Risks and repercussions. *Economic Analysis and Policy*, 69, 340–349. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.12.016>
- Meiryani, M., Fernando, E., Dewiyanti, S., Angelus, M., & Haliyanti, I. (2021). The Effect of Covid-19 on Regional Revenue of DKI Jakarta Province, Indonesia. *ACM International Conference Proceeding Series*, 122–128. <https://doi.org/10.1145/3471988.3472009>
- Nemec, J., & Špaček, D. (2020). The Covid-19 pandemic and local government finance: Czechia and Slovakia. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 837–846. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0109>
- Putra, M. S. P. (2020). Hotel and Restaurant Tax Domination as a Source of Local Revenue of Badung Regency: A Study Amidst the Covid-19 Pandemic Era. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 7(2), 114–122. <https://doi.org/10.22225/jj.7.2.2375.114-122>
- Rababah, A., Al-Haddad, L., Sial, M. S., Chunmei, Z., & Cherian, J. (2020). Analyzing the effects of COVID-19 pandemic on the financial performance of Chinese listed companies. *Journal of Public Affairs*, 20(4). <https://doi.org/10.1002/pa.2440>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara.
- Sayadi, M. H. (2021). Apbn 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid-19. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 159–171. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.269>
- Setiawan, R. (2020). Update Corona Indonesia, 31 Desember 2020: 194 Jiwa Meninggal Dunia. Retrieved January 10, 2021, from tirto.id website: <https://tirto.id/update-corona-indonesia-31-desember-2020-194-jiwa-meninggal-dunia-f8Hg.%09>
- Soehardi, S., & Untari, D. T. (2020). The Effect of Covid-19 Pandemic on Hotel Employees, Hotel Occopancy Rates and Hotel Tax Income in Jakarta, Indonesia. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(12), 964–972.

- <https://doi.org/10.31838/srp.2020.5.138>
- Sulaeman. (2021). Genjot PAD, Pemda Diminta Bangun Infrastruktur Digital. Retrieved from Merdeka.com website: <https://www.merdeka.com/uang/genjot-pad-pemda-diminta-bangun-infrastruktur-digital.html>. Diakses, 20 November 2021
- Syamsul. (2020). Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.20473/baki.v5i1.17937>
- Syamsul, Nurlailah, & Nurhadi. (2022). *KRISIS PANDEMI COVID-19 : DAMPAKNYA PADA PENDAPATAN DAERAH*. 10(2), 1–10. <https://doi.org/10.32497/keunis.10i2.3293>
- Syamsul, S. (2019). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong: Sebuah Analisis. *Akuntabilitas*, 13(2), 109–126. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i2.9643>
- Tirto.id. (2020). PAD Menyusut Akibat COVID-19, Bagaimana Pemda Menyiasatinya? Diakses, 20 Oktober 2021.
- Ward, B., Sipior, J. C., & Lombardi, D. R. (2020). COVID-19: State Sales and Use Tax Implications. *Information Systems Management*, 37(4), 343–347. <https://doi.org/10.1080/10580530.2020.1820639>

Lampiran:**Lampiran 1. Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Nama Provinsi	Populasi			Sampel		
		Kab.	Kota	Jumlah	Kab.	Kota	Jumlah
1	Aceh	18	5	23	3	1	4
2	Sumatera Utara	25	8	33	3	2	5
3	Sumatera Barat	12	7	19	2	1	3
4	Riau	10	2	12	1	1	2
5	Jambi	9	2	11	1	1	2
6	Sumatera Selatan	13	4	17	2	1	3
7	Bengkulu	9	1	10	1	1	2
8	Lampung	13	2	15	1	1	2
9	Jawa Barat	18	9	27	3	2	5
10	Jawa Tengah	29	6	35	5	2	7
11	DI Yogyakarta	4	1	5	0	1	1
12	Jawa Timur	29	9	38	4	2	6
13	Kalimantan Barat	12	2	14	1	1	2
14	Kalimantan Tengah	13	1	14	1	1	2
15	Kalimantan Selatan	11	2	13	1	1	2
16	Kalimantan Timur	7	3	10	1	1	2
17	Sulawesi Utara	11	4	15	1	1	2
18	Sulawesi Tengah	12	1	13	1	1	2
19	Sulawesi Selatan	21	3	24	3	1	4
20	Sulawesi Tenggara	15	2	17	2	1	3
21	Bali	8	1	9	0	1	1
22	Nusa Tenggara Barat	8	2	10	1	1	2
23	Nusa Tenggara Timur	21	1	22	3	1	4
24	Maluku	9	2	11	1	1	2
25	Papua	28	1	29	4	1	5
26	Maluku Utara	8	2	10	1	1	2
27	Banten	4	4	8	0	1	1
28	Bangka Belitung	6	1	7	1	0	1
29	Gorontalo	5	1	6	0	1	1
30	Kepulauan Riau	5	2	7	0	1	1
31	Papua Barat	12	1	13	1	1	2
32	Sulawesi Barat	6	0	6	1	0	1
33	Kalimantan Utara	4	1	5	0	1	1
	Jumlah	415	93	508	50	35	85

Sumber: Data diolah, 2021

Lampiran 2. Sampel Penelitian

Provinsi	Kabupaten/Kota	Provinsi	Kabupaten/Kota	
Prov. Aceh	Kab. Aceh Singkil	Prov. Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	
	Kab. Pidie		Kota. Palangka raya	
	Kab. Aceh Jaya		Kab. Banjar	
Prov. Sumatera Utara	Kota Banda Aceh	Prov. Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	
	Kab. Mandailing Natal		Kab. Kutai kartanegara	
	Kab. Tapanuli Tengah		Kota Balikpapan	
	Kab. Samosir		Kab. Minahasa	
Prov. Sumatera Barat	Kota Sibolga	Prov. Sulawesi Utara	Kota Manado	
	Kota Pematang Siantar		Kota Palu	
	Kab. Pesisir Selatan		Kab. Morowali	
	Kab. Pasaman		Kab Gowa	
Prov. Riau	Kota Padang	Prov. Sulawesi Selatan	Kab Sinjai	
	Kab. Kampar		Kab Pinrang	
	Kota Pekanbaru		Kota Makassar	
Prov. Jambi	Kab. Kerinci	Prov. Sulawesi Tenggara	Kab Kolaka	
	kota Jambi		Kab Muna	
Prov. Sumatera Selatan	Kab. Lahat	Prov. Bali	Kota Kendari	
	Kab. Banyuasin		Kota Denpasar	
	Kota Palembang		Kab. Lombok Timur	
Prov. Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Prov. Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	
	Kota Bengkulu		Kab. Sumba Timur	
Prov. Lampung	Kab. Lampung Barat	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	
	Kota Metro		Kab. Sikka	
	Kab. Bogor		Kota Kupang	
Prov. Jawa Barat	Kab. Garut	Prov. Maluku	Kab. Maluku Tengah	
	Kab. Bekasi		Kota Ambon	
	Kota Bandung		Kab. Merauke	
	Kota Depok		Kab. Mimika	
Prov. Jawa Tengah	Kab. Cilacap	Prov. Papua	Kab. Asmat	
	Kab. Kebumen		Kab. Yahukimo	
	Kab. Sragen		Kota Jayapura	
	Kab. Pati		Kab. Halmera Selatan	
	Kab. Tegal		Kota Ternate	
Prov. DI Yogyakarta	Kota Surakarta	Prov. Banten	Kota Tangerang	
	Kota Semarang		Kab. Bangka	
	Kota Yogyakarta		Kota Gorontalo	
Prov. Jawa Timur	Kab. Pacitan	Prov. Bangka Belitung	Kota Batam	
	Kab. Jember		Kab. Mankowari	
	Kab. Ngawi		Kota Sorong	
	Kab. Gresik		Kab. Mamuju	
	Kota Malang		Prov. Sulawesi Barat	Kota Tarakan
	Kota Surabaya			Prov. Kalimantan Utara
	Kab. Sambas			
Prov. Kalimantan Barat	Kota Pontianak			

Sumber: Data diolah, 2021

